

LAPORAN UJI PETIK Kuartal 2

TEMA

PERSIAPAN PENCAIRAN DAN PEMANFAAT BPM

JUNI 2019
OSP VI KALIMANTAN SELATAN

A. PENDAHULUAN

Lokasi dampingan Program KOTAKU di Kalimantan Selatan terdiri atas 239 desa/kelurahan yang terdiri atas 153 lokasi kelurahan pencegahan dan 130 lokasi kelurahan peningkatan (flag 1 dan 2) yang tersebar di 10 kota/kabupaten. Salah satu target pendampingan hingga triwulan 2 tahun 2019 adalah tersusunnya kesiapan perencanaan dan pemanfaatan di 38 kelurahan/desa yang mendapatkan BPM.

Salah satu upaya untuk memastikan kualitas kesiapan perencanaan dan pemanfaatan yang telah disusun oleh masyarakat melalui fasilitasi tim pendamping, maka perlu dilakukan pemastian berjenjang yang harus dilaksanakan oleh OSP hingga Tim Korkot melalui kajian lapang (uji petik) yang dilakukan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran umum dari kualitas kelembagaan, akses informasi dan akuntabilitas, . kualitas dokumen perencanaan, kesiapan pencairan bpm2019, kinerja kolaborasi penanganan kumuh, efektifitas kerja KPP dan kualitas data SIM.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan uji petik triwulan 2 tahun 2017 ini adalah untuk mengetahui proses siklus KOTAKU ditingkat desa/kelurahan pada tahap persiapan dan perencanaan serta memahami pola hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas output kesiapan pelaksanaan BPM 2019.

Tujuan Khusus ujipetik adalah :

- Mengetahui tahap persiapan dan perencanaan, memahami POS infrastruktur 2019
- Mengetahui konsep pradiseign penataam pemukiman dan pemakeatan pekerjaan
- Mengetahui ketepatan usulan kegiatan infrastruktur dengan RO
- Mengetahui realisasi Pelaksanaan BPM 2019

Rekapitulasi Lokasi Uji Petik Triwulan 2 tahun 2019

Realisasi pelaksanaan uji petik di lingkungan kerja OSP 6 Provinsi Kalimantan Selatan seperti tersaji dalam table berikut ini:

Tabel 1
Rekap pelaksanaan Uji Petik

No	KOTA/KABUPATEN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	Pelaksanaan	Tema Uji Petik
1	Banjar	Martapura	Tanjung Rema	Juni 2019	perencanaan, persiapan BPM 2019
2	Banjar	Martapura	Murung Keraton	Juni 2020	perencanaan, persiapan BPM 2020
3	Banjamasin	Banjarmasin Timur	Pekapuran Raya	Juni 2021	perencanaan, persiapan BPM 2021
4	Banjamasin	Banjarmasin Utara	Alalak Selatan	Mei 2022	perencanaan, persiapan BPM 2022
5	Banjarbaru	Landasan Ulin	Landasan Ulin Timur	Mei 2022	perencanaan, persiapan BPM 2023
6	Barito Kuala	Marabahan	Ulu Benteng	Juni 2024	perencanaan, persiapan BPM 2024
7	Tanah Laut	Pelaihari	Sarang Halang	Juni 2025	perencanaan, persiapan BPM 2025
8	Tanah Laut	Pelaihari	Panjaratan	Juni 2026	perencanaan, persiapan BPM 2026
9	Hulu Sungai Utara	Amuntai Tengah	Antasari	Juni 2027	perencanaan, persiapan BPM 2027
10	Hulu Sungai Tengah	Barabai	Barabai Darat	Juni 2028	perencanaan, persiapan BPM 2028
11	Kotabaru	Pulau Laut Utara	Rampa	Juni 2029	perencanaan, persiapan BPM 2029
12	Kotabaru	Pulau Laut Utara	Kotabaru Hulu	Juni 2030	perencanaan, persiapan BPM 2030

B. REVIEW CAPAIAN PELAKSANAAN KOTAKU

Secara umum hasil uji petik penyiapan kegiatan perencanaan dan penyiapan pencairan BPM 2019 selengkapnya disajikan pada table di bawah ini:

Tabel 2
Analisa Uji Petik perencanaan dan persiapan BPM 2019

No	TOPIK	Capaian Kuantitatif dari 12 Kel/Desa	Issue/Catatan Lapangan	Faktor Penyebab	Rekomendasi
A	Kelembagaan BKM	Baik 2 (17%) Cukup 0 (0%) Kurang 10 (83%)	<ul style="list-style-type: none"> Audit KAP rutin dilakukan tiap tahun disemua kel/desa pelaksanaan pemilu bagi BKM yang sudah habis periode sesuai dengan AD, namun ada beberapa BA pemilu basis tidak lengkap. Forum kolaborasi belum menjadi isu Bersama. Cenderung kelembagaan di kelurahan.desa jalan sendiri sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan forum kelurahan atau desa untuk kerjasama dalam penanganan isu kumuh dan kemiskinan Pengarsipan administrasi kegiatan belum terata baik 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan LKM, Kelurahan dan unit terkait tentang forum bersama untuk penanganan kumuh Penguatan USK secretariat terkait dengan pengelolaan dokumentasi
B	Akses Informasi & Akuntabilitas Masyarakat	Baik 4 (33%) Cukup 1 (8%) Kurang 7 (58%)	<ul style="list-style-type: none"> Pengaduan belum dikelola dengan baik oleh BKM, sebagian besar belum ada buku pengaduan Pengaduan yang banyak adalah berupa pertanyaan dan ditanyakan langsung kepada BKM namun masih lemah dalam administrasi PIM belum merata sampai masyarakat khususnya lokasi calon kegiatan infrastruktur 2019 	<ul style="list-style-type: none"> PIM belum jadi kebutuhan LKM/Desa Pengaduan yang telah ditindaklanjuti belum menjadi dasar untuk perbaikan kinerja LKM 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan LKM dan UP terkait pentingnya PIM. Penguatan bisa dilaksanakan melalui pelatihan atau rakor LKM

C	Kualitas Dokumen Perencanaan	Baik Cukup Kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan wajah permukiman belum terlihat masih bersifat problem solving. • Dokumen perencanaan sudah cukup baik, sudah sesuai dengan ketentuan POS Infra 2019 • Rencana kerja KSM masih belum tersusun dengan baik. • Outcome kegiatan untuk pengurangan kumuh harus dipastikan dengan memasukkan data ke SIM SPPL di Kab. Tanah Laut dan Banjar belum ditandatangani Dinas LH • RAB beberapa kelurahan masih haru dikonsultasikan lagi dengan Tim Satker 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlsi penataan permukiman masih lemah (tidak punya tematik/karakter) • Safeguard lahan masih belum dilengkapi SPPL • Outcome belum dimasukkan di SIM • Kurang pahami KSM terkait perencanaan dan pelaksanaan kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan konsep dalam pre desain, tema permukiman dimunculkan dan sudah terlihat dalam perencanaan perubahan wajah permukiman dan verifikasi ulang bersama askot Urban Planner • Tim fasilitator melakukan bimbingan dalam penyusunan proposal rencana kerja KSM/panitia pelaksana, sesuai ketentuan POS skala lingkungan 2019 • Korkot bersama askot berkonsultasi dengan tim Kab khususnya terkait SPPL • Input SIM terkait outcome segera input di SIM online
D	Kesiapan Pencairan BPM	Baik 7 (58%) Cukup 2 (17%)	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Banjar, banjarbaru, HSU dan tanah laut belum terbit 	<ul style="list-style-type: none"> • Lambatnya proses pengesahan Revisi DIPA Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Menunggu revisi DIPA dan SK Satker

	2019	Kurang 3 (25%)	<p>SK Satker baru dan revisi DIPA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dokumen pencairan sudah dibuat dan ditandatangani pihak terkait dengan catatan DIPA dan SK Satker dikosongi dulu. 2 kabupaten, dokumen SPPL belum ditandatangani dinas LH 	<p>dan Kabupaten SK Satker di pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman/pemahaman yang beda dinas LH terkait SPPL . pejabat LH Kab. Tanah laut masih baru 	<ul style="list-style-type: none"> Penyiapan pemantapan dokumen secara lengkap dan valid sehingga saat SK turun sudah tidak ada masalah Keterlibatan Satker untuk mengkoordinasikan terkait SPPL ke Dinas LH
E	KINERJA KOLABORASI PENANGANAN KUMUH	Baik 4 (33%) Cukup 0 (0%) Kurang 8 (67%)	<ul style="list-style-type: none"> Forum Kolaborasi secara informal sudah ada, namun belum sesuai dengan kebutuhan (fasilitasi Lurah/Kades melalui musren dan rapat koordinasi) RPLP jadi salah satu pijakan Lurah/Kades untuk rencana kegiatan dana desa dan dana kelurahan yang akan datang Belum semua kolaborasi dimasukkan di SIM Kotaku 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya fasilitasi yang intens terkait advokasi kolaborasi, target 0 kumuh 2019 harus menjadi acuan utama Tim Faskel/Korkot/OSP/Satker/Kades/Lurah Pemasaran dokumen RPLP yang kurang giat di desa/kabupaten Tim Korkot kurang tealten memasukkan data kolaborasi ke SIM Kotaku 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas tim terkait target kolaborasi yang sudah ditetapkan di KPI Korkot/askot mandiri memfasilitasi ke Pemda dan CSR untuk memasarkan dokumen RPLP dan DED Pengendalian OSP terkait input data kolaborasi ke SIM
F	EFEKTIFITAS KERJA KPP	Baik 5 (42%) Cukup 0 (0%) Kurang 7 (58%)	<ul style="list-style-type: none"> KPP yang sudah terbentuk dilakukan penguatan peran dan fungsi organisasi O & P. Rencana Kerja KPP belum ada Sebagian besar dana 	<ul style="list-style-type: none"> Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemeliharaan Lunturnya gotong royong dalam kegiatan masyarakat terhadap lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan terhadap KPP serta fasilitasi aturan bersama untuk pemeliharaan kegiatan yang sudah dan akan

			<p>pemeliharaan belum terencana dan terpenuhi</p>		<p>dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melibatkan Lurah/Kades, Pemda untuk bersama sama membentuk KPP ditingkat desa dan menganggarkan operasional dan pemeliharaan
G	KUALITAS DATA SIM	<p>Baik 12 (100%) Cukup 0 (0%) Kurang 0 (0%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Data SIM sudah menggambarkan kondisi riil terkait dengan kelembagaan seperti audit BKM, Pemilu BKM , PIM , status BKM dan kolaborasi KPI belum bias diakses 	<ul style="list-style-type: none"> KPI belum tersedia di WEB Terkait pengurangan kumuh ada perbedaan rumus yang berdampak pada nilai pengurangan kumuh (kewenangan KMP) SIM Day jarang dilakukan di level tim faskel dan Korkot , analisa data hanya didapat dari OSP dan Asmandat 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan analisa data oleh asmandat dan sub SIM OSP melauai coaching atau koordinasi rutin Menggalakkan kembali SIM day di tingkat Korkot dan Tim Fasilitator